

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokratisasi telah di mulai di Indonesia dengan lahirnya Orde Reformasi, berbicara tentang demokrasi, mau tak mau juga berbicara tentang peran militer. Sebab, militer merupakan salah satu komponen utama yang menentukan apakah sebuah negara layak disebut demokratis atau belum. Di Indonesia awal terbentuknya militer hanya untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dari cengkaman penjajah. Para pendiri bangsa sadar bahwa perjuangan tidak hanya melalui jalur diplomasi saja diperlukan perjuangan fisik yang mampu mengusir penjajah dari Indonesia. Meskipun demikian tentara tidak selamanya berfungsi sebagai alat pertahanan semata, militer dapat menjadi suatu kekuatan politik ketika aparatur sipil tidak berfungsi dengan baik, seperti pemberontakan PKI di Madiun. Sewaktu terjadi pemberontakan PKI di Madiun aparat sipil tidak berfungsi dengan baik, dan karena tuntutan keadaan maka militer pun masuk dalam sistem politik Indonesia. Sebagai negara demokrasi yang besar di Asia Tenggara, Indonesia harus mengawasi dan meniadakan peran militer dalam politik

Keterlibatan militer dalam politik sudah terjadi sejak Indonesia merdeka, ada banyak peristiwa yang terjadi pada orde lama dari kabinet yang tidak stabil dan tidak mampu bertahan lama, hingga peristiwa Supersemar. Pada masa orde baru, militer lebih aktif lagi dalam politik praktis. Orde baru memberikan peran dan kesempatan yang besar terhadap militer untuk berkecimpung dalam urusan-urusan sipil. Karena itu, terjadilah hegemoni militer yang luar biasa negara menjadi semakin kuat, sementara kekuatan civil society terus merosot. Keadaan ini melahirkan situasi represif yang amat menyengsarakan demokrasi. Dalam amanat pertamanya di Yogyakarta Panglima Besar Jendral Soedirman menyatakan: Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tunduk kepada pimpinan atasannya dengan ikhlas mengerjakan segala yang diwajibkan. Harus diingat pula, oleh karena negara Indonesia tidak cukup dipertahankan tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar tentara; tidak bisa menjadi alat suatu golongan atau siapapun juga¹. Dari apa yang telah diamanatkan oleh Panglima Besar Jendral Soedirman tentara tidak boleh ikut campur dalam politik dan tidak bisa menjadi alat suatu golongan atau siapapun juga, baik partai politik, pengusaha atau badan-badan lainnya.

Kehadiran militer dalam pemerintahan selalu berpengaruh dalam setiap sistem pemerintahan yang ada di dunia bahkan di Indonesia sendiri. Pengaruh militer di Indonesia dapat di lihat dari beberapa masa pemerintahan, dari masa orde lama, orde baru dan era reformasi yang telah menjadi siklus pemerintahan Indonesia. Awal keterlibatan militer muncul pada masa orde lama, sudah dapat di lihat dari peristiwa 17 oktober 1952 dalam peristiwa itu terjadi ²krisis politik besar yang pertama, yang pertama, yang melibatkan tentara kedalamnya adalah "Peristiwa 17 Oktober" tahun 1952. Dengan dukungan pemerintah secara berturut-turut antara tahun 1950 dan 1952, kepemimpinan militer teknokratik telah berupaya membina kekuatan yang lebih kecil, lebih berdisiplin dan lebih "profesional".

Di masa orde baru militer lebih aktif lagi dalam politik praktis. Orde baru memberikan peran dan kesempatan yang besar kepada militer untuk berkecimpung dalam percaturan politik dan adanya fraksi TNI/Polri di DPR semakin mempertegas kekuatan militer dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tampilnya Orde Baru di bawah pimpinan Jendral Soeharto bertujuan melakukan koreksi terhadap penyimpangan pada masa Orde Lama, seperti pelaksanaan demokrasi terpimpin yang melanggar UUD 1945, terpusatnya kekuasaan di tangan Presiden, dan lainnya. Soeharto bertekad tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Soekarno. Hal ini dapat dilihat dari pidatonya di depan sidang DPR tanggal 16 Agustus 1967. Dalam

² Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi, 1999) hal 27

pidato kenegaraan itu, Soeharto menegaskan:³“Apabila kami dalam kesempatan ini mengemukakan secara terperinci penyelewengan Orde Lama, itu adalah sekedar mengingatkan pada kita, bahwa Orde Baru yang bertekad mengadakan perbaikan-perbaikan yang menyeluruh mengadakan ordening-ordening penertiban dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, tidak akan mengulangi, tidak terjerumus lagi ke dalam praktik-praktik yang demikian buruknya itu”. Dari apa yang ditegaskan oleh Soeharto tersebut kenyataannya melenceng jauh dari apa yang ia katakan, adanya dwi fungsi ABRI (sekarang TNI) dan kestabilan politik adalah alat ukur masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jika di dalam suatu pemerintahan terjadi kestabilan politik, maka militerisme telah terjadi di negara tersebut, masa kepemimpinan yang terjadi selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto adalah salah satu contoh riil yang terjadi di Indonesia.

Keterlibatan militer dalam politik umumnya didorong oleh suatu tujuan juga ideal yaitu keinginan untuk memperbaiki suatu sistem politik juga, dirasakan bobrok, untuk membangun ekonomi yang dilihat kocar-kacir, dan untuk merangsang perkembangan sosial budaya yang sehat. Jelasnya untuk memperlancar proses modernisasi secara menyeluruh (nation building), dan oleh karena itu mempunyai sifat pembaharuan atau reformis.⁴ Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto merupakan sebuah pemerintahan yang telah dikuasai oleh militer secara total. Rezim otoriterian Orde Baru tersebut

³ *Opcit. Hal 137*

⁴

ditopang oleh kekuatan militer dengan menggunakan instrumentasi doktrin dwifungsi, Golkar dan penguasaan atas jalur birokrasi. Militer masuk ke dunia politik dengan mendapatkan 100 kursi legislatif tanpa melalui mekanisme Pemilu.

Kehadiran Jendral Soeharto dengan Orde Baru yang syarat dengan dominasi tentara atau militer dalam kehidupan politik nasional membawa dampak yang sangat luas bagi keberadaan otoriterianisme. Politik hanya menjadi domain dari sekelompok kecil orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan di Jakarta. Kestabilan politik dalam pemerintahan Soeharto memang berjalan baik, kestabilan politik merupakan tujuan dari pemerintahan yang di kuasi oleh militer. Karena menurut militer dengan adanya kestabilan politik, maka kestabilan ekonomi akan baik dan akan mendatangkan investor.

Menurut Mas'ood, ciri-ciri struktural sistem politik Orde Baru menyerupai ciri-ciri model "otoriterisme-birokratik"⁵ sebagaimana yang dikemukakan oleh Guillermo O'donnell dan model "korporatisme-negara" yang dikemukakan oleh Phillipe Schmitter dan Richard Gunther, meski tidak sepenuhnya sama.

⁵ Afan Gaffar, *Merangsang Partisipasi Rakyat*. Dalam Syarofian arba M.F. (ed). *Demitologisasi*
P. 111-112. Jakarta: PT. Gramedia Widayakarya, Jakarta 1998

Rezim otoriter birokratik mempunyai ciri-ciri:

1. Pemerintah dipimpin oleh militer sebagai suatu lembaga, bekerjasama dengan para “teknokrat” sipil,
2. Ia didukung oleh para “wiraswastawan” oligopolistik, yang bersama negara bekerja sama dengan masyarakat bisnis internasional,
3. Proses pembuatan kebijaksanaannya didominasi oleh pendekatan birokratik-teknokratik, dengan demikian menghindari proses tawar-menawar yang lama diantara berbagai kelompok kepentingan,
4. Massa didemobilisasikan
5. Pemerintah menggunakan berbagai tindakan represif untuk mengendalikan oposisi.⁶

Adanya Orde Baru telah melahirkan hegemoni militer kuat, militer mempunyai peran yang dominan dalam politik, sehingga militer menjadi aktor dalam penetapan kebijakan publik. Militer imasa Orde Baru dengan luasannya menjalankan exspansinya ke wilayah sipil, invansi militer kewilayah sipil diantaranya:

1. Intervensi Politik

Intervensi politik para perwira dilakukan dengan berbagai cara, keterlibatan dengan cara menduduki sejumlah jabatan publik atau kekaryaan, keberadaan fraksi ABRI mulai dari DPR samapai DPRD, dan yang terakhir adalah ABRI bertanggung jawab atas satu wilayah konstituensi diantaranya Kodam dan Kodim.

Tabel 1.1

Kaitan Sturuktur Adminitrasi Organisasi Militer Dan Sipil

Posisi Militer	Presiden	Tempat
Panglima Angkatan Bersenjata	Mentri Dalam Negeri	Menteri lainnya
Komandan Daerah/Resort (Kodam, Korem)	Gubernur	Kantor Propinsi
Komandan Distrik(Kodim)	Bupati, walikota	Kantor Kabupaten
Komandan Rayon(Koramil)	Camat	Kantor Kecamatan
Babinsa	Kepala desa	Desa

2. Pengusaha berseragam

Keterlibatan militer dalam ekonomi memiliki tujuan, pertama menjamin stabilitas ekonomi ayitu memagari semua kebijakan yang diambil pemerintah, dan yang kedua mencukupi kebutuhan tentara yang tidak mampu dipenuhi oleh negara. Adanya mall yang dimiliki oleh militer adalah salah satu contoh keterlibatan militer diwilayah sipil. Dan salah satunya adalah

3. Ekspansi militer ke aspek sosial

Ekspansi militer ke dalam komunitas sipil akan menjadi persoalan yang rumit, militerisme baru akan menjadi masalah ketika nilai, ideology dan organisasi militer tersebut dipraktikkan komunitas sipil. Nilai dan ideology militer sangat mudah ditemui di komunitas sipil. Di tingkat paling kecil tampil dalam wujud kebiasaan memberikan hukuman fisik (bukan pengertian) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atas nama kedisiplinan. Diluar rumah, nilai dan ideology serta organisasi militer dapat ditemui dalam sejumlah praktek kemasyarakatan melalui hukuman terhadap pengendara motor yang ugal-ugalan. Ekspansi militer dapat ditemui dilingkungan sekolah, keluarga dan tempat kerja memperlihatkan secara kasar sejumlah bentuk ekspansi militer dalam berbagai ranah kehidupan komunitas sipil di Indonesia. Jadi militer sangat berperan dalam penerapan nilai dan ideology militernya di komunitas sipil.

Penumbangan rezim militer yang di pimpin oleh Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun harus dibayar dengan kerusuhan-kerusuhan yang melanda Indonesia diberbagai daerah, tragedi Tri Sakti adalah salah pengorbanan bangsa ini untuk membebaskan diri dari militerisasi dan militerisme. Melalui gelombang reformasi bangsa Indonesia telah membuka ruang yang lebih lebar bagi pembongkaran wacana hubungan sipil dan militer. Selama ini hubungan sipil dan militer bukan saja dibangun di atas doktrin militer yang cenderung subyektif, tetapi juga tidak pernah menjadi

senjata, mendefinisikan perannya sendiri dan menutup pendefinisian kaum sipil. Legitimasi historis menyangkut peran militer dalam perjuangan kemerdekaan nasional dijadikan titik tolak dari pemosisian mereka dalam wilayah sosial dan politik. Pada gilirannya militer menjadi kekuatan politik dominan yang sangat interventif terhadap berbagai persoalan publik dan kenegaraan.

Kecenderungan itulah yang harus direformasi. Artinya, bagaimana kekuatan militer tidak lagi terjebak dalam kepentingan kekuasaan belaka, melainkan lebih melayani kepentingan rakyat dalam arti yang seluas-luasnya dan sebenar-benarnya. Sebab untuk konteks Indonesia, track record militer yang terjebak dalam arus kepentingan kekuasaan sangat jelas, yakni ketika militer melayani kepentingan subyektif kekuasaan rezim Soekarno, rezim militer Soeharto, dan rezim transisional Habibie. Kesemua itu adalah sejarah kelabu penindasan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi di Indonesia, maka militer harus dikembalikan kepada rakyat. Ini berarti militer tidak perlu mendefinisikan sendiri posisi dan perannya dalam kancah kehidupan bernegara. Selain agar militer tidak terjebak dalam spektrum kepentingan politik yang sempit, hal itu juga penting untuk mendekatkan militer dengan cita-cita demokrasi bangsa. Adalah otoritas rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara untuk mendefinisikan posisi dan peran militer. Rakyat, yang merupakan entitas politik sipil, berwenang menentukan dan sekaligus

...tentang peran dan fungsi militer dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Menurut Janusz, kontrol sipil atas kekuatan militer merupakan aksioma demokrasi. Hal ini sebenarnya sejalan dengan doktrin TNI yang setiap saat kita dengar: Yang terbaik untuk rakyat adalah terbaik untuk TNI. Dengan begitu kita sesungguhnya berharap profesionalisme militer dapat segera terwujud di Indonesia.

Sebagai pertimbangan saja atau setidaknya jadi pedoman kita agar militerisasi dan militerisme tidak terjadi lagi di Indonesia. Sejarah kerajaan Romawi sangat bermanfaat untuk kita ikuti sebentar. Dalam tahun 510 S.M. Roma beralih dari kerajaan menjadi republik, berhubung dengan kekhawatiran bahwa pemusatan kekuasaan dapat membuka pintu bagi kembalinya monarki, maka Angkatan Bersenjata Roma ditempatkan dibawah dua orang Konsul, yang tiap hari bergiliran memegang komando. Pada waktu itu pasukan Roma terdiri dari petani-petani yang menjalankan wajib militer. Setelah wilayah Roma menjadi luas, maka terpaksa diterima prajurit-prajurit upahan yang hanya setia kepada panglima yang membayar upah mereka. Perubahan sistem itu membuka pintu bagi avontur-ovontur politik para panglima, sehingga timbul perang saudara. Panglima yang unggul dalam perang saudara itu menjadi "Kaisar" suatu gelar yang berasal dari nama panglima Julius Caesar.⁷ Pada satu ketika dibentuklah suatu pasukan khusus pengawal Kaisar dengan nama "Garde Praetorian". Garde itu sangat terkenal dalam sejarah Romawi oleh karena sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seorang Kaisar turun tahta dan untuk menentukan siapa yang

⁷ - - - - -

akan jadi Kaisar. Tindakan-tindakan itu dapat dilihat sebagai gejala permulaan proses keruntuhan sistem politik dan kebudayaan politik Kerajaan Romawi. Sekarang "Praetirianisme" dikenal dengan tindakan-tindakan sesuatu angkatan bersenjata untuk mengakhiri kekuasaan pemerintah.

Setelah Orde Baru ditumbangkan oleh mahasiswa dan rakyat, mau tak mau militer harus mengurangi peran politiknya di Indonesia. Dan tuntutan reformasi pun di jawab oleh TNI dengan mengadakan pembenahan-pembenahan. Tuntutan itu di respon dengan usaha reposisi dan redefinisi, khususnya fungsi sosial politik yaitu untuk mengakhiri dwi fungsinya. Pada Sidang Tahunan MPR 2002 para pimpinan TNI dan Polri akan mengundurkan diri dari DPR dan MPR pada tahun 2004, dan bukan pada tahun 2009, seperti yang dinyatakan dalam TAP MPR Nomor VII Tahun 2000. Reformasi yang sentral adalah secara bertahap meminimalisir fungsi sospol ABRI/TNI, seperti diinginkan para mahasiswa. Termasuk kedalam kategori ini adalah penghapusan staf kekaryaan dan sospol, pensiun dini untuk anggota militer aktif yang disertai tugas sipil/non-militer dan memberikan "timetable" terhadap kehadiran wakil TNI dan Polri di DPR dan DPRD serta MPR. Ini berpuncak pada Sidang Tahunan 2002 dimana ditetapkan bahwa TNI dan Polri akan mengakhiri wakil-wakilnya di DPR/DPRD dan MPR pada masa setelah pemilu 2004.

Tetapi, satu terobosan juga dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid adalah mengangkat tokoh-tokoh sipil untuk jabatan Menteri

Mahfud MD tokoh-tokoh sipil ini tidak mempunyai pengaruh di kalangan TNI. Namun, posisi Menhan di Indonesia tidaklah sekuat Menhan di Amerika Serikat karena tidak membawahi Panglima TNI dan Kepala Staf sehingga tidak memiliki wewenang komando atas pasukan-pasukan. Bahkan jabatan panglima TNI sejajar dengan Menteri Pertahanan sehingga Menteri Pertahanan hanya mengurus soal administrasi saja. Inilah mungkin dilema pokok dari pengertian supremasi sipil di Indonesia yakni Menteri Pertahanan tidak memiliki wewenang atas mutasi TNI yang sepenuhnya berada di tangan Panglima TNI. Demiliterisasi inilah yang dilakukan ditubuh TNI.

Di negara bangsa modern, apa yang dinamakan militer adalah angkatan bersenjata yang biasanya terdiri dari 3 atau 4 angkatan perang, yakni darat, udara, laut dan atau mariner. Sedangkan polisi, meskipun diberi kewenangan memegang senjata, tidak termasuk didalamnya. Di Indonesia batasan militer berbeda dari waktu ke waktu. Militer dalam Orde Lama adalah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada Tahun 1959 sebutan APRI diubah menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Melalui UU Nomor 13/1961 Pasal 3, Keppres Nomor: 225/1962, Keppres Nomor: 290/1964 menetapkan Kepolisian Negara RI adalah ABRI. Dengan demikian, ABRI meliputi Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) dan Kepolisian Negara RI.⁸ Pada masa Orde

⁸ Lihat Buku *Peraturan Perundang-Undangan Pertahanan dan Keamanan RI*, Sekretariat Jenderal Dephankam, Jakarta, 1996, Hal 88

Baru batasan militer pun sama, sedangkan pada Orde Reformasi, terhitung mulai 1 April 1999, yang disebut militer adalah bukan lagi ABRI melainkan TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Polri secara organisasi terpisah dari TNI dan berdiri sendiri dengan kedudukan langsung di bawah Presiden. Sedangkan TNI tetap berada di bawah komando Panglima TNI yang kedudukannya di bawah Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Ironisnya setelah TNI dan Polri tidak satu atap lagi, perseteruan antar kedua instansi itu sering terjadi, terutama dalam bentuk bentrok fisik. Dan kesekian kalinya, anggota TNI dan Kepolisian RI adu tembak. negara seperti dunia kobo. Tentara dan polisi sebagai pengendali senjata dan penjaga keamanan serta perdamaian masyarakat justru menjadi biang kerusuhan. Peristiwa di Ambon pada Sabtu, 4 Maret 2006, merupakan puncak gunung es dari persoalan mendasar yang melingkupi kedua kekuatan tersebut. Sebelumnya beberapa kasus bentrok anggota TNI-Polri terjadi di beberapa wilayah, baik dalam bentuk perkelahian maupun adu tembak, seperti di Madiun (2001), Binjai (2002), Pontianak (2003), Ambon dan Cimanggis serta Depok (2005). Peristiwa ini akan terus berlanjut apabila tidak ada penyelesaian substantif, baik secara struktural maupun kultural, dari masing-masing kekuatan. Tidak bisa dibayangkan babak akhir perselisihan dua kelompok bersenjata di negara yang sangat rentan konflik akibat keragaman budaya, suku, dan agama ini. Di samping menodai misi primordial TNI-Polri sebagai alat pertahanan keamanan konflik tersebut meniadakan proses

konsolidasi, baik di tubuh TNI maupun Polri, yang belakangan ini berusaha memperbaiki citra sejarah masa lalunya yang kelam.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka pokok permasalahan adalah: Bagaimanakah dinamika relasi militer terhadap supremasi sipil di Indonesia (Tahun 2004-2007) relasi militer terhadap supremasi sipil yang mencakup ekonomi, politik dan sosial.

C. Kerangka dasar teori

1. Militer

Masyarakat tradisional sering menempatkan para cerdik pandai sebagai golongan utama dan bukan golongan yang bersenjata. Di eropa sebelum revolusi Perancis bila orang membicarakan golongan-golongan atau orde-orde (ada tiga) dalam masyarakat (estates/staden) orang mengurutkan secara hirarkis golongan gereja, bangsawan dan baru rakyat biasa. Berbicara mengenai politik, kita tidak dapat melepaskan diri dari persoalan rulling class (golongan yang memerintah) yaitu suatu golongan minoritas yang memegang kekuasaan di tiap-tiap masyarakat dan negara, yang memerintah golongan terbesar, yakni rakyat.⁹

⁹ Untuk itu lihat: G mosca, *The Rulling Class*, (Elementi di Scienza Politica). Mac Graw Hill Book Comp. New York and London: 1939

Militer adalah seorang ahli perang atau ahli menggunakan kekerasan. Dalam sejarah, perang adalah satu jalan cepat untuk mencapai kekuasaan, memperoleh yang besar, pokoknya untuk naik dalam status. Pada perang dunia I (1914–1918) orang mulai menganggap lain karena senjata telah menjadi alat penghancur. Masa demokrasi terpimpin adalah masa–masa buruk TNI, dan awal keterlibatan militer ke dunia sipil. Pada tahun 1950–1966, TNI mengalami pertikaian didalam tubuhnya sendiri, yang diakibatkan oleh persaingan antar kelompok dan campur tangan politisi. Kasus 17 Oktober 1952 merupakan contoh yang jelas dari kekecewaan tentara terhadap perilaku dan campur tangan politisi di parlemen dalam urusan profesionalisme, yang kemudian menimbulkan perpecahan di TNI. Samuel P. Huntington mengatakan korps perwira modern merupakan suatu badan yang profesional dan perwira modern adalah orang yang profesional. Seperti profesi dokter, pengacara dan lain sebagainya yang mempunyai tingkat spesialisasi yang berbeda, perwira modern adalah perwira yang profesional. Profesi sendiri penulis definisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu. Keahlian dapat ini dapat diperoleh melalui pendidikan yang tinggi dan pengalaman. Menurut Harold Lasswell keahlian utama militer adalah manajemen kekerasan. Fungsi kekuatan militer adalah

Tugas perwira itu sendiri meliputi:

- a. Pengaturan, perlengkapan, dan pelatihan angkatan bersenjata
- b. Perencanaan kegiatannya
- c. Pengarahan kegiatan operasinya di dalam dan di luar pertempuran.

Profesionalisme militer dapat terwujud dengan adanya kontrol sipil yang kuat. Kontrol sipil diperlukan guna mengantisipasi kekuatan militer yang dominan dan membangkitkan hegemoni tentara.

Huntington menyatakan bahwa, untuk meminimalkan kekuasaan militer secara umum ada dua jawaban besar. Pertama, Kontrol sipil secara subjektif, yakni dengan memaksimalkan kekuasaan sipil. Hal ini merupakan cara yang paling sederhana dalam meminimalkan kekuasaan militer dengan memaksimalkan kekuasaan kelompok sipil dalam hubungannya dengan militer. Dalam manifestasinya sepanjang sejarah, kontrol yang subjektif telah diidentifikasi dengan memaksimalkan kekuasaan institusi pemerintah tertentu, kelas-kelas sosial, dan bentuk-bentuk konstitusioanl tertentu. Kedua, kontrol sipil yang obyektif, yakni dengan memaksimalakan profesionalisme militer. Lebih tepatnya adalah pembagian kekuasaan politik diantara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk menciptakan situasi kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku profesional diantara para anggota korp perwira.¹⁰ Angkatan darat dan Angkatan laut yang dipimpin

¹⁰ Untuk lebih jelasnya lihat: Samuel P. Hutington, *Prajurit dan Negara, Teori dan Politik* (Jakarta: UII, 1997).

oleh para perwira sudah ada sebelum tahun 1980. Pada umumnya mereka adalah orang bayaran atau para aristokrat. Bagi orang bayaran hal tersebut adalah bisnis belaka, bagi aristokrat yang amatiran, hal tersebut adalah hobi. Dalam hal tujuan profesionalnya tentara bayaran mengejar keuntungan, sedangkan para aristokrat mengejar kehormatan dan petualangan. Tentara bayaran sudah ada pada masa perang salib I, diantara para prajurit Tuhan itu, bergabung pula batalion-batalion pemanah, sepasukan pengawal, dan sepasukan prajurit bayaran yang disebut "turcoples" yaitu para prajurit berdarah campuran yang telah teruji kemampuannya selama bertahun-tahun ketika berperang melawan para pemanah.¹¹

Keterlibatan militer dalam politik sudah tua usianya, yakni sejak pengawal-pengawal pretorian kerajaan Roma yang dibentuk sebagai unit satu unit tentara khusus maharaja melakukan sebuah kudeta dan menguasai pemilahan pemilu. Pretorianisme yang dimaksud adalah sebuah situasi dimana tentara (angkatan bersenjata) tampil sebagai aktor politik utama yang sangat dominant yang secara langsung menggunakan kekuasaan mereka. Pada umumnya militer dapat berkembang dengan baik pada negara-negara yang sedang berkembang, yang masih membutuhkan kestabilan ekonomi dan kestabilan politik untuk menuju kenegara maju.

Konsepsi militer profesional timbul dengan menjadi kompleksnya masyarakat modern yang berlainan dengan masyarakat tradisional yang

¹¹ James reston, Jr. *Warriors of God Pasukan-Pasukan Tuhan Perang Salib, Kerajaan Surga*. Beranda Publishing, Yogyakarta 2007

hanya melihat adanya tiga golongan yaitu gerejawan, bangsawan dan golongan ketiga. Masyarakat modern melihat berbagai golongan yang disatukan dalam warga. Dengan singkat para ahli strategi dan ahli kekerasan yaitu militer, dilihat sejajar dengan profesi dokter, pengacara, ahli hukum dan ahli sejarah. Keahlian tersebut tidak memberi dia hak yang lebih banyak atas negara daripada ahli-ahli lainnya, artinya harus tunduk pada kekuasaan politik. Namun dunia modern cukup realistis dan mengakui fakta bahwa berhubung dengan keahlian dan memonopoli atas senjata golongan militer ini maka kaum militer dapat melampaui batas-batas profesionalisme mereka dan mencampuri urusan kemasyarakatan, dunia modern mencela dan menghukumnya sebagai "militerisme" atau "praetorianisme" praetorianisme adalah istilah bagi pengawal militer Kaisar Romawi yang pada masa runtuhnya kerajaan Romawi memaksakan pada Roma kaisar karena suapan dari para calon.¹²

Eric A. Nordlinger mengklasifikasikan campur tangan/intervensi militer dalam politik menjadi tiga macam.¹³ Pertama adalah moderator pretorian. Moderator praetorian menggunakan hak veto atas keputusan pemerintahan dan politik, tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri. Walaupun pihak sipil yang memerintah, tetapi kekuasaan mereka diawasi oleh militer yang tidak akan meneriama supremasi penuh pihak sipil.

¹² Farchan Bulkin, *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Militer dalam Zaman Moderen* LP3ES Juli 1988

¹³ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* Jakarta: Duta, Sinar Harapan, Anasakti

“Moderator” praetorian ini bertindak sebagai kelompok yang berpengaruh dan terlibat dalam politik. Dalam hubungan mereka dengan pemimpin sipil, kadangkala mereka mengancam akan melakukan kudeta. Jika perlu, mereka akan mengadakan satu kudeta penggantian dimana sebuah pemerintahan digulingkan dan digantikan oleh sekelompok orang sipil lainnya yang dapat dikuasai dan diterima oleh militer.

Kedua adalah pengawal pretorian. Setelah pengawal pretorian menggulingkan sebuah pemerintahan sipil, umumnya mereka sendiri akan memegang tampuk pemerintahan untuk periode hingga dua hingga empat tahun. Berhubungan dengan tujuan-tujuan pemerintah, mereka biasanya tidak berbeda dari moderator pretorian yang ingin menghalangi perubahan politik dan mempertahankan peraturan politik. Hanya pengawal pretorian yang merasa yakin bahwa sasaran tersebut lebih mudah dicapai apabila mereka sendiri yang menguasai pemerintahan. Perwira militer pun pada umumnya agak enggan untuk menguasai pemerintahan itu sendiri. Pengawal pretorian berbuat demikian sebagian disebabkan kepercayaan bahwa tidak ada pilihan lain karena tidak adanya satu golongan elit yang dapat mempertahankan status quo politik dan ekonomi, atau tanpa kudeta, kekuasaan akan berpindah ke tangan elit politik yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pihak militer.

Yang terakhir adalah penguasa pretorian. Penguasa pretorian ini jarang ditemukan bila dibanding dengan moderator pretorian dan pengawas

pretorian. Diperkirakan jumlah besarnya tidak lebih dari 10 persen dari

semua kasus campur tangan militer. Tetapi kekuasaan yang luas serta cita-cita politik dan ekonomi yang tinggi membuat mereka menjadi bagian penting dalam kajian mengenai pretorianisme ini. Kalau dibanding dengan rekan-rekan pengawas mereka, penguasa pretorian bukan saja menguasai pemerintahan, tetapi juga mendominasi rezim tersebut, dan kadang kala coba menguasai sebagian besar kehidupan politik ekonomi dan social melalui pembentukan struktur yang bermobilisasi. Tujuan dan ekonomi penguasa Pretoria adalah sangat tinggi, hingga kadangkala mereka menganggap dirinya sebagai golongan modernisasi yang radikal atau revolusioner.

Tabel 1.2
Tingkat Intervensi Militer¹⁴

Jenis	Tingkat Kekuasaan	Tujuan Ekonomi dan Politik
Moderator	Hak veto	Mempertahankan status quo
Pengawal	Menguasai pemerintahan	Mempertahankan status quo dan/atau memperbaiki penyalahgunaan dan kelemahan
Pemerintah	Pengaruh Rezim	Membuat perubahan politik dan kadang-kadang perubahan sosio ekonomi

Dalam pengertian elit militer, demokratisasi itu tidak lebih dari segenap usaha untuk membangun sebuah usaha untuk membangun sebuah sistem "dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat". Gerakan reformasi politik

yang paling penting oleh karenanya adalah mengatur kembali hubungan antara “rakyat”(the society) dan “Negara” (the state) dalam sebuah masyarakat negara, atau dalam istilah Aristotelian, politik. Dalam sistem demokrasi, negara memberikan kepada rakyat perlindungan yang luas atas kebebasan individu dan kelompok. Selain itu negara menjamin pluralisme menyeluruh bagi masyarakat sipil dan partai politik, menyelenggarakan peradilan yang bebas, dan menyediakan lembaga kontrol untuk akuntabilitas publiknya. Dalam hubungan itu harus ada ruang untuk membatasi kekuasaan negara, misalnya dengan perimbangan kekuasaan (checks and balances), antara lembaga-lembaga negara.

2. Civil Society

Civil society merupakan entitas penengah antara negara dan pribadi atau swasta. Pelaku civil society tidak hanya mengontrol penguasa agar tidak berlebihan menggunakan kekuasaannya, tapi juga melegitimasi kekuasaan negara apabila kekuasaan itu berdasarkan pada hukum yang berlaku. Civil society lebih mementingkan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Oley karena itu ia berhubungan dengan negara dalam beberapa hal, tapi tidak membantu memenangkan kekuatan formal dalam suatu negara, ia lebih menekankan pada pluralisme dan pengakuan adanya perbedaan. Civil society juga mempunyai empat cirri utama, pertama, egaliter, yaitu bahwa semua manusia secara sosial politik dipandang sama, tanpa memandang darimana asal usul, agama dan pandangan politiknya.

Kedua, prinsip prestasi dan bukan prestise, misalnya keturunan dan

kesukuan. Ketiga keterbukaan untuk berpartisipasi. Artinya, masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya dalam pembuatan keputusan publik. Keempat, penentuan kepemimpinan melalui pemilihan yang jujur, bebas, langsung, adil, dan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat.¹⁵

3. Demiliterisasi

Demiliterisasi atau penarikan diri dari panggung politik dan sangat tergantung pada lamanya rezim berkuasa (rezim militer), tingkat keterlibatan militer dalam pemerintahan, kesolidan dan lain sebagainya.

Menurut Ulf Sundhausen demiliterisasi dapat dilakukan disuatu negara maka terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan.¹⁶

- a. Seluruh faksi dalam militer yang mampu melakukan aksi politik sepihak sepakat menyerahkan kekuasaan mereka kepada sipil. Didalam negara rezim militer terdapat kecenderungan bahwa didalam institusi militer terjadi faksionalisme sehingga membagi militer menjadi faksi keras, faksi lunak, faksi moderat, faksi konvensional dan lain-lain. Salah satu syarat mutlak demiliterisasi adalah adanya kesatuan pendapat didalam militer untuk menyerahkan kekuasaan kembali kepada sipil.

¹⁵ Abdoel Fattah. *Demiliterisasi Tentara : Pasang Surut Politik Militer 1945-2004, Dampak Dwijungsi ABRI terhadap Pertumbuhan Civil Society* LKis Oktober 2005

¹⁶ Abdurrahman Wahid dan kawan-kawan. 1999. *Berpolitik atau Kembali ke Barak; Militer Dalam Wacana Masyarakat Madani*. Bigraff Publishing Yogyakarta.

- b. Harus terjaminnya kepentingan-kepentingan yang dianggap pemimpin rezim militer sebagai hal yang esensial seperti otonomi militer, jaminan kesejahteraan dan terutama perlindungan secara fisik keselamatan pimpinan rezim.
- c. Rezim sipil pengganti harus menghindari pemotongan anggaran pertahanan secara drastis sebab jika hal ini dilakukan maka akan menyebabkan militer menganggap sipil telah berusaha menentang militer.
- d. Pimpinan militer melihat bahwa pemerintahan sipil yang ada merupakan alternatif politik yang dapat terus bertahan maksudnya adalah rezim militer harus diyakinkan bahwa keberadaan elit-elit sipil tidak hanya menyiapkan jamunan bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya saja tetapi sipil harus kelihatan mampu menciptakan pemerintahan yang stabil.

Pembagian otonomi yang jelas tersebut merupakan produk tawar menawar militer akan bersedia untuk memberikan semua kekuasaan yang dimiliki dalam negara dengan imbalan sipil mau menjamin kepentingan militer.

4. Reformasi dan Profesionalisme Militer

Reformasi dan profesionalisme tentara merupakan kunci dari keberhasilan demokrasi di Indonesia. Dengan keprofesionalisme mereka tentara tidak boleh ikut campur dalam bidang ekonomi dan politik, karena keterlibatan mereka yang bukan bidangnya akan mengikis profesionalisme

militer. Militer di tempa untuk mempertahankan negara. Reformasi TNI mesti dilakukan demi profesionalisme tentara, baik secara eksternal dan internal. Reformasi Internal TNI adalah tuntutan perkembangan demokrasi yang harus disikapi secara sadar oleh prajurit untuk melakukan penyesuaian, baik secara structural, doktrin, maupun sikap dan perilaku. Perumusan paradigma baru sebagai pedoman reformasi internal telah diolah di lingkungan TNI yang tepat sebagai komponen bangsa yang sedang menjalani proses demokratisasi

Demokratisasi adalah sebuah proses untuk mendemokratisasikan sistem politik yang dulunya otoriter menuju rezim yang lebih demokratis. Banyak kemungkinan yang terjadi dalam masa fase ini. Bisa kembali menuju otoritarianisme atau maju kedepan menuju ke rezim yang lebih demokratis. Kunci pokoknya adalah bagaimana kekuatan demokrasi dikonsolidasikan, dan sejauh mana kontrol sipil terhadap militer. Di Indonesia sendiri demokratisasi masih berjalan dan ada banyak hal yang terjadi dalam proses menuju negara yang demokratis. Semasa orde lama perkembangan demokrasi masih simpang siur, keterlibatan militer dalam pemerintahan terjadi ketika institusi politik yang lemah dan pimpinan politik yang ambisius yakni mereka yang memasukan militer sebagai kaki tangannya untuk melemahkan atau menghancurkan demokrasi. Kebijakan Soekarno untuk memasukan militer sebagai kaki tangannya menjadi malapeta bagi demokrasi di Indonesia, apalagi ketika Soekarno mengangkat militer sebagai golongan fungsionaris,

Sedangkan mengenai peran militer yang sudah aktif melibatkan diri dalam perpolitikan nasional dan sudah mendapatkan hak prerogatif di pemerintahan berminat mendorong proses demokratisasi telah berjalan, sebagai contoh pejabat Gubernur sementara di Sulawesi Selatan yang merupakan pensiunan dari militer, pensiunan perwira tersebut membantu proses demokrasi di wilayah tersebut yang sedang dilanda konflik Pilkada.

¹⁷Menurut Mohtar Mas'ood dalam hal aktor politik 'militer-sebagai-institusi', kita bisa berspekulasi sebagai berikut:

- Pada dasarnya, eksistensi militer selama ini bergantung pada keberhasilan pembangunan ekonomi.
- Pemerintah yang sedang menghadapi ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, memerlukan dukungan politik dari militer. Baik ancaman yang berasal dari parlemen, hal semacam ini lebih sering di terapkan di Indonesia. Menempatkan militer sebagai kaki tangan untuk mengendalikan dan melemahkan atau menghancurkan demokratisasi.
- Kepentingan untuk menghilangkan pesaing dari dalam tubuh militer bisa mendorongnya untuk men-depolitisasi tentara dan mengembangkan koalisi dengan kelompok sipil utama. Ini juga

¹⁷ Mohtar Mas'ood *Demokrasi Melalui Reformasi Tentara* disampaikan pada Seminar Nasional "Mencari format Baru Hubungan Sipil-Militer Indonesia" diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu

bisa menjadi inisiatif bagi perwira tersebut untuk melakukan “negosiasi”.

5. Supremasi sipil

Supremasi sipil adalah menempatkan militer dibawah kekuasaan sipil, segala penentuan kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan dikelola oleh sipil tanpa ada intervensi pihak militer. Dalam model Supremasi sipil, sipil harus tetap menghargai dan menghormati profesionalitas militer dan tidak berhak berhak mencampuri kebijakan-kebijakan internal militer dan begitu pun sebaliknya. Profesionalisme militer dapat di lihat dari, bidang ekonomi politik dan hokum sosial budaya masyarakat

Tabel 1.3

Hubungan Supremasi Sipil

No	Militer	Hubungan Militer-Sipil
1	Peran independen militer dalam sistem politik	Militer hanya boleh menjamin keamanan dan ketertiban dalam negeri atas perintah pejabat eksekutif? Atau berdasar UU diperbolehkan mengurus keamanan dalam negeri.
2	Hubungan dengan pimpinan eksekutif	Pimpinan eksekutif de jure dan de facto adalah panglima tertinggi? Atau kendali de facto atas tentara di tangan panglima aktif masing-masing angkatan?
3	Koordinasi sector pertahanan	De jure dan de facto dilakukan oleh pejabat setingkat menteri (biasanya sipil yang ditunjuk oleh kepala eksekutif yang mengendalikan suatu staf yang melibatkan banyak pegawai negeri professional atau pemimpin politik sipil? Atau de jure dan de facto dilakukan oleh panglima masing-masing angkatan secara terpisah?
4	Partisipasi perwira aktif dalam kabinet	Hanya panglima angkatan? Atau, panglima semua angkatan ditambah dengan berbagai menteri untuk urusan keamanan.
5	Peran badan legislatif	Semua isu kebijakan penting mengenai anggaran, struktur angkatan, dan persenjataan dimonitor oleh parlemen? Pimpinan tentara bisa dipanggil untuk dengar pendapat mengenai soal pertahanan?

6	Peran pegawai negeri sipil senior atau politisi sipil	Pegawai sipil professional atau politisi sipil ikut membantu cabang eksekutif merancang dan menerapkan kebijakan hankam? Atau semua dilakukan oleh perwira militer aktif? Sipil hanya sebagai pegawai biasa.
7	Peran Intelijen	Badan-badan intelijen puncak de jure dan de facto dikendalikan oleh rantai komando sipil? Reviu dilakukan oleh dewan sipil? Atau dikendalikan oleh jendral aktif yang menggabungkan pengumpulan informasi dengan fungsi operasi? Tanpa ada badan reviu yang independen?
8	Peran polisi	Dikendalikan oleh kementerian non-militer atau pejabat local? Militer aktif tidak boleh memimpin suatu unit polisi? Atau dikendalikan oleh komando militer?
9	Peran dalam promosi militer	Dibahas dalam parlemen? Eksekutif menerima rekomendasi dewan jabatan militer professional? Kepala eksekutif bebas menentukan sendiri pengisian jabatan pimpinan tentara? Atau militer menentukan sendiri batasan bagi pola promosi. Kepala eksekutif hanya memilih dari daftar yang dibuat oleh dewan jabatan masing-masing angkatan.
10	Peran dalam perusahaan negara	Tidak boleh? Atau yang boleh hanya perwira cadangan? Atau perwira aktif juga boleh?
11	Peran dalam sistem hukum	Militer tidak punya yuridiksi legal diluar perkara yang terbatas, yaitu mengenai pelanggaran internal mengenai disiplin militer? Di luar itu, orang sipil maupun militer bisa dikenai hokum sipil dan peradilan sipil? UU keamanan nasional dan system peradilan militer meliputi wilayah masyarakat politik dan 'civil society'? Militer tidak bisa diadili di pengadilan sipil..

Sumber: Adaptasi dari Stepan (1988: 94-97)¹⁸

¹⁸ Stepan Alfred, *Rethinking Military Politics* Princeton University Pre, 1988 hal 94-97 di
 "MILITARIANISME DAN PERKEMBANGAN DI INDONESIA"

D. Definisi Konseptional

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Kalau masalah dan teoritisnya sudah jelas, biasanya diketahui pada fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta-fakta gejala itu.

1. Militer

Militer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentaraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu negara. Militer merupakan penjaga keamanan terhadap ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

2. Militerisasi

Militerisasi adalah tumbuh dan berkembangnya militerisme dalam kehidupan sehari-hari. Watak yang menjadi karakter militer seperti kekerasan, penyeragaman, komodoisme dan lain sebagainya menjadi budaya masyarakat. Di Indonesia proses ini mendapat legitimasinya melalui konsep dwi fungsi ABRI.

3. Militerisme

Militerisme adalah paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagai pendukung kekuasaan, pemerintahannya dikuasai oleh golongan militer, dan diatur secara militeristik. Negara yang dikuasai oleh militer biasanya dalam

mengelola konflik dengan menggunakan cara-cara kekejaran, tingkat disiplin yang kaku, dan lain sebagainya.

4. Demiliterisasi

Demiliterisasi adalah penarikan militer dari ranah politik dan mengembalikan posisinya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan Negara dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Yakni suatu proses pembebasan dari ikatan atau dari sifat-sifat kemiliteran.

5. Pretorian

Pretorian disini mengacu pada situasi dimana tentara tampil sebagai aktor politik utama yang sangat dominant yang secara langsung menggunakan kekuasaan mereka. Tentara menjadi pretorial apabila mereka mengancam atau menggunakan kekuasaan untuk mendominasi arena politik. Tingkat intervensi militer dalam politik dapat di bagi menjadai tiga:

- Moderator praetorian
- Pengawal pretorian
- Pemerintah praetorian

6. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Dimana rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan kehidupannya sendiri. Dalam negara yang demokratis rakyat diberlakukan sebagai subyek dalam

7. Transisi Demokrasi

Transisi demokrasi sering terjadi di negara berkembang. Transisi sendiri dapat diartikan sebagai proses demokrasi, tegasnya, perspektif transisi cenderung melihat kejatuhan rezim otoriter dan proses transisi politik. Dan Indonesia sendiri termasuk dalam negara yang mengalami transisi demokrasi.

8. Hegemoni Militer

Hegemoni militer adalah peran yang dominan militer dalam ranah politik. Militer menjadi aktor yang dominan dalam mempengaruhi kebijakan politik dalam tata pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia militer mendapat legitimasinya melalui ideologi "Dwi Fungsi" ABRI (sekarang TNI).

E. Metode Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengidentifikasi hubungan antara demiliterisasi dengan penguatan supremasi sipil.
- Mengkaji lebih mendalam kehidupan militer di Indonesia sebagai upaya pembentukan masyarakat yang mandiri, adil, demokratis, dan partisipatif.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif.

- a. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu. Sedangkan cirri-ciri metode deskriptif adalah:
 - Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual.
 - Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian di analisa.
- b. Penelitian eksploratif yaitu: metode penelitian yang berusaha mencari atau mengungkapkan hal-hal baru yang belum di ungkap sebelumnya. Menurut Masri Singarimbun dan Soffian Effendi, Ciri-ciri penelitian eksploratif adalah penelitian penjajakan atau bersifat terbuka, masih mencari-cari, pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti masih terlalu tipis untuk melakukan studi deskriptif.
- c. Jenis penelitian Deskriptif Eksploratif adalah suatu penelitian yang mendapatkan data awal atau hal-hal baru yang masih samar-samar yang dilakukan peneliti mungkin untuk mendapatkan suatu

3. Data Yang Dibutuhkan

Penelitian ini sengaja di batasi agar lebih fokus, yaitu pasca reformasi 1998. Tetapi tidak begitu saja melupakan faktor kesejarahan. Bagi penulis proses demokratisasi Indonesia dimulai sejak kejatuhan rezim orba yang militeristik dan sentralistik yang berakibat pada tumpulnya kekuatan sipil (civil society) di Indonesia. Model pendekatan kekerasan dan represifitas yang digunakan militer untuk menyelesaikan konflik terhadap warga sipil semasa Orba telah menimbulkan gejolak sosial-politik yang meletup pada 1998 dengan lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Seiring dengan proses demokratisasi tuntutan untuk mengembalikan peranan militer “ke barak” yakni sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara semakin menguat. Kepercayaan dan citra militer pasca 1998 sendiri dimata masyarakat semakin memudar. Untuk merespon gejala ini misalnya Markas Besar TNI mengeluarkan konsep baru atau paradigma baru, yakni redefenisi, reposisi, dan reaktualisasi peran militer dalam kehidupan berbangsa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan bahan-bahan referensi/studi pustaka. Adapun sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.

5. Teknik Analisa Data

Teknik kualitatif, yaitu dengan menganalisa permasalahan tanpa menggunakan data statistik atau matematis, serta dengan menggunakan content analysis, yaitu dengan menganalisa isi agar mendapatkan suatu jawaban yang ilmiah, logis, dan empiris..

6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan disusun berdasarkan bab per bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab, hal ini dimaksudkan agar memudahkan penulis dalam membedakan jenis permasalahan yang diteliti. Sedangkan sub-sub babnya dimaksudkan untuk menguraikan isi dari tiap-tiap bab secara terperinci, sehingga akan diperoleh pemahaman yang komprehensif. Skripsi ini akan dibagi dalam lima bab.

BAB I: Pendahuluan, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Kerangka Teori, Definisi Konseptual, Metode Penelitian.

BAB II: Membahas Demiliterisasi Pasca Kejatuhan Rezim Soeharto, Sejarah Keterlibatan Institusi Militer Dalam Bidang Sosial Politik Di Indonesia, Demiliterisasi Periode Habibie, Periode Abdurrahman Wahid, Periode Megawati Soekarno Putri, Periode Susilo Bambang Yudoyono

BAB III: Membahas Bisnis Militer dan Supremasi Sipil, Supremasi Sipil, Tiga Bentuk Bisnis Militer, Menempatkan Posisi Militer Pada Posisi Yang Sebenarnya.

BAB IV: Membahas Pengaruh Militer Terhadap Sistem Perpolitikan Di Indonesia, Pengaruh Militer Ditinjau Dari Relasi Militer Terhadap Supremasi Sipil, Pengaruh Militer Terhadap Ekonomi, Pengaruh Militer Terhadap Perpolitikan Di Indonesia Dan Kehidupan Sosial Masyarakat.

BAB V: Penutup, Kesimpulan, Saran